

BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

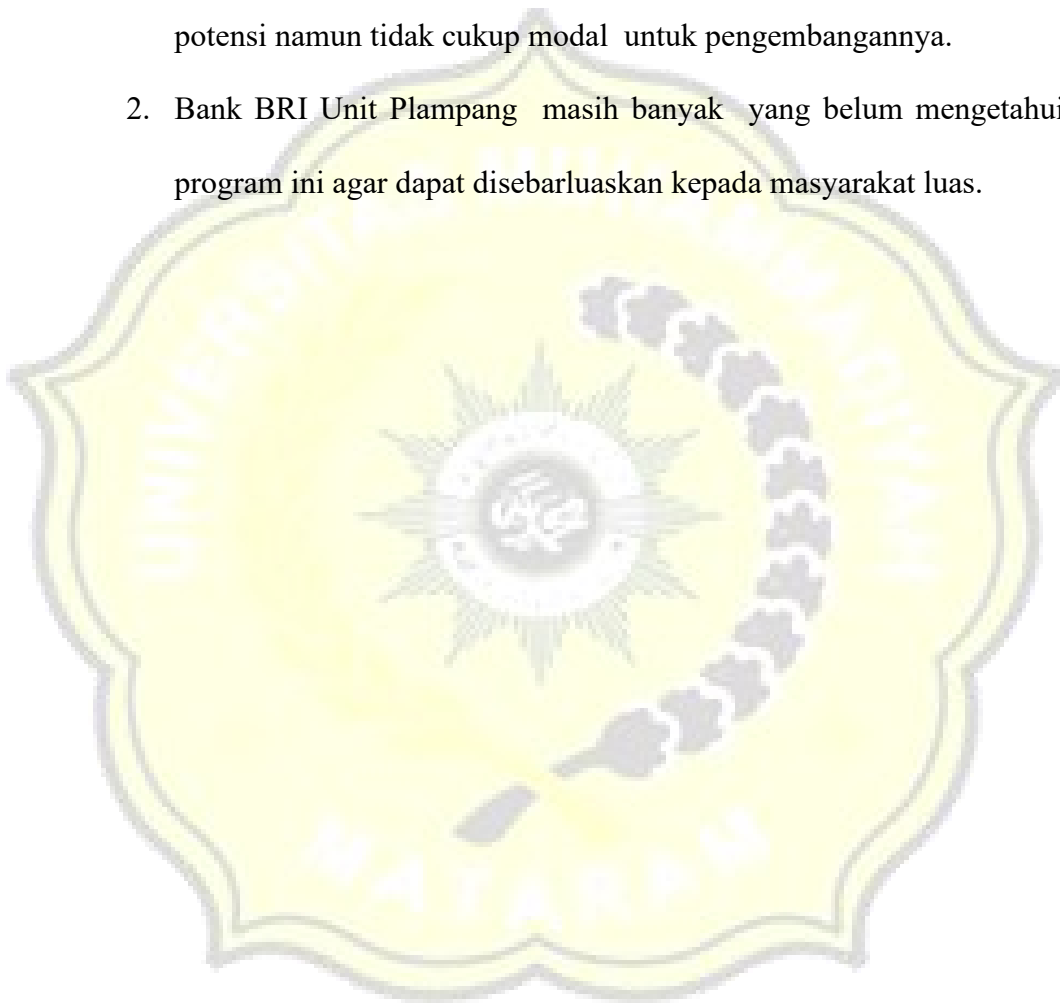
Berdasarkan penjelasan penulis sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektivitas penyaluran kredit usaha rakyat untuk pengembangan UKM di Kecamatan Pranpan Efektivitas kredit usaha rakyat di bank BRI Unit Pranpan untuk pengembangan UKM menggunakan benchmark yaitu pencapaian, keterpaduan dan penyesuaian tujuan Pengembangan UKM di Kecamatan Planpan, yang menentukan efektivitas gender dan penyaluran KUR, dikatakan efektif karena batas waktu penerimaan dana KUR bagi debitur yang lebih awal dan tepat sasaran.
2. Tahap penyaluran KUR BRI unit Plampang terdiri dari calon debitur yang mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi dan menandatangani formulir. Customer service (CS) melakukan pengecekan keutuhan data, dan mantri KUR membawa data tersebut ke lapangan untuk dianalisis di kantor. Hasil analisa tersebut kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh CS dan diserahkan kepada manajer unit untuk diverifikasi. Jika tidak ada kesalahan pada saat validasi, manajer unit menentukan bahwa aplikasi pinjaman telah diterima dan data dikirim langsung ke CS untuk pembayaran.

1.2 Saran

Berdasarkan analisis data yang dilakukan, kami memiliki saran dan masukan sebagai berikut:

1. Diharapkan program pemerintah ini secara khusus menyasar para pelaku usaha yang senantiasa menjalankan KUR dan memiliki potensi namun tidak cukup modal untuk pengembangannya.
2. Bank BRI Unit Plampang masih banyak yang belum mengetahui program ini agar dapat disebarluaskan kepada masyarakat luas.



DAFTAR PUSTAKA

- Ade Raselawati, (2011) *Pengaruh Perkembangan Usaha Kecil Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor UKM Di Indonesia*, Skripsi, (Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah: Jakarta,
- Ariani, dan Utomo, Mohamad Nur. (2017). *Kajian Strategi Pengembangan Usaha*
- Arif Mudassir, DJuliati Saleh, Nasrulhaq. (2020) *Efektivitas Penyaluran KUR (Kredit Usaha Rakyat) Pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Tanah Lemo Kecamatan Bonto Bahari Kabupaten Bulukumba* Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Unismuh Makassar, Indonesia
- Asnawi. (2013) *Efektivitas Penyelenggaraan Publik Pada Samsat Corner Wilayah Malang Kota*, Skripsi S-1 Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, UMM, hlm.6 dan *Manajemen*, Volume 13, Nomor 2, September 2017, 99-118.
- Farida Nur lailatul, (2020). *Pengaruh modal usaha terhadap pengembangan usaha mikro kecil dan menengah unggulan di kota Kediri*. Skripsi. program studi ekonomi syariah fakultas ekonomi dan bisnis islam institute agama islam negeri Kediri.
- Firdaus Rachmat, Ariyanti Maya. (2004). *Manajemen Penkreditan Bank Umum : Teori Masalah kebijakan dan aplikasinya*. ALFABETA: Bandung, Hlm.16

Ginandjar Karta sasmitha, (2018) *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, (Jakarta: PT Pusaka Cisendo,(1996), hlm 145.Kementerian Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (KUKM) .

Hidayat Rian. (2021). *Strategi pengembangan umkm dimasa pandemi*, skripsi. program studi teknik industri fakultas Teknik, Universitas Muhammadiyah Palembang.

Julia Sopha. (2010),Efektivitas Program,FISIP UI. Hlm.6

Kementerian *coordinator* bidang perekonomian Indonesia

M subana, Sudrajat, (2005). *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia)

Menteri Keuangan No. 10 / PMK.05 / 2009 tentang Fasilitas Penjamin Kredit Usaha Rakyat,*Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Tarakan. Jurnal Organisasi*

Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (PERMENKO) No 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat

Saifuddin Azwar, (1998). *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar offset), hlm 6

Steers.M. Richard,(1985),Efektivitas Organisasi,Jakarta, Erlangga,

Sugiyono. (2005). *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta

Ulum.Ihyaul MD,(2004), Akuntansi Sektor Publik. Malang,UMM Press.

Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,

Undang-undang No 10/1998 (pasal 21 ayat 11)

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No 7/1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-undang No 7/1992 Tentang Perbankan

Undang-undang Nomor 9 tahun 1995

UU No 10/1998 lembaga perantara (lembaga intermedias intermediary)

Widianti Riska. (2015) *Efektifitas penyaluran Kredit Usaha Rakyat dalam memberdayakan UKM di Kecamatan Banyusari Malausma (Studi Kasus: Bank BRI unit Malausma*".Skripsi.(2015)Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Cirebon.

Zubaedi, (2007) *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Jakarta: Ar Ruzz Media)(2007), hlm 42.

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/10493/5/BAB%20II.pdf> diakses pada tanggal 8

November 2021

<http://repository.unpas.ac.id/31615/2/G.%20BAB%20II.pdf> (diakses pada tanggal 8 November 2021)

<https://text-id.123dok.com/document/dzx5pwwqr-tujuan-dan-sasaran-program-kredit-usaha-rakyat-pelaksanaan-kredit-usaha-rakyat-kur-tingkat-bunga-kredit-usaha-rakyat.html> (diakses pada tgl 5 Desember 2021)

<https://bri.co.id/kredit-kemitraan> (diakses pada 7 januari 2022)

<https://text-id.123dok.com/document/dzxn51wqr-slogan-visi-dan-misi-bank-republik-indonesia-bank-bri-struktur-organisasi-bank-bri-unit-sei-sikaming.html>

(Diakses pad tanggal 29 Desember 2021)

(<https://sumbawakab.bps.go.id> (diakses pada tanggal 27 desember 2021))



LAMPIRAN

